

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PUTUSAN CERAI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN PEJABAT YANG  
BERWENANG TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983  
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**TESIS**

**Oleh :**

**PUDJIANTONO PINUGROHO**

**201820252002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA JAYA  
TAHUN 2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Proposal/Tesis : **Analisis Yuridis Penetapan Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Pejabat yang berwenang Terkait Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Nama Mahasiswa : Pudjiantono Pinugroho

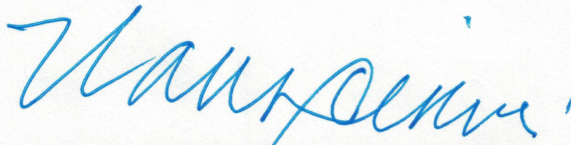
Nomor Pokok Mahasiswa : 201820252002

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum

Bekasi, .....Januari 2021

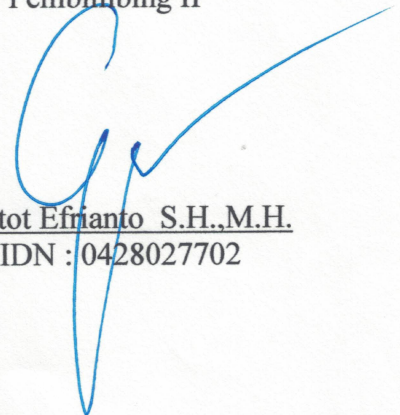
**MENYETUJUI**

Pembimbing I



Dr. Ir. Hanafi Darwis, S.H., S.Pd., M.M.  
NIDN : 0323015604

Pembimbing II



Dr. Gatot Efrianto S.H., M.H.  
NIDN : 0428027702

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Yuridis Penetapan Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Pejabat yang berwenang Terkait Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Nama Mahasiswa : Pudjiantono Pinugroho

NPM : 201820252002

Konsentrasi : Hukum Perdata

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 5 Februari 2021

Bekasi. ...., 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Ir. Hanafi Darwis, S.H., S.Pd., M.M.  
NIDN. 0323015604

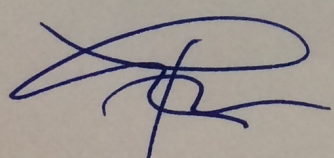
Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NIDN. 0319077606

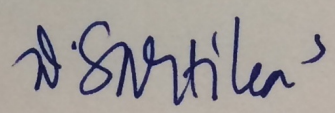
Penguji II : Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D.  
NIDN. 307078203

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

  
Dr. Lusia Sulastris, S.H., M.H.  
NIDN. 0127117401

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang Terkait Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 5 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Pudjiantono Pinugroho

NPM : 201820252002

## ABSTRAK

**Pudjiantono Pinugroho. 201820252002.** Analisis Yuridis Penetapan Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kasus Putusan Pengadilan mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasan yang berwenang, yang bertujuan menjawab masalah tentang (1) Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Pejabat yang berwenang ? dan (2) Bagaimana Akibat Hukum Putusan Cerai tanpa izin pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri Sipil ?

Data Penelitian dihimpun melalui analisa terhadap Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2010/PA.Grt , Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.KP, Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2014/PA.Tlb dan Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2019/PA.Bks. yang di analisis dengan tehnik deskriptif menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa disertai surat izin dari Pejabat yang berwenang telah sesuai dengan hukum formil dan materiil yang menjadi dasar beracara di Pengadilan Agama karena berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai tidak adanya surat izin dari pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan butir 5 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Akibat Hukum Putusan Cerai tanpa izin pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri Sipil, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 , Pasal 15 ayat (1) dijatuhi Hukuman Berat.

Sejalan dengan Kesimpulan diatas, maka perlunya perubahan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yakni seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perceraian tidak perlu mendapat izin dari pejabat tetapi hanya melaporkan secara administrasi dan Perlunya Penghapusan sanksi dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian tanpa izin Pejabat dikarenakan sanksi tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang.

## ABSTRACT

**Pudjiantono Pinugroho.201820252002.** Juridical Analysis of Decision on Divorce for Civil Servants without Authorized Officials' Permit Related to Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants.

The Court Decision Case regarding the Divorce of Civil Servants without permission from the competent superior, which aims to answer the problem of (1) How is the juridical analysis of the decision to divorce civil servants without permission from the authorized official? and (2) What are the legal consequences of a decision on divorce without the authorized official's permission on civil servants?

Research data were collected through analysis of Decision Number 1096 /Pdt.G/2010/PA.Grt, Decision Number 0007/Pdt.G/2013/PA.KP, Decision Number 0069/Pdt.G /2014/PA.Tib and Decision Number 3096/Pdt.G/2019/PA.Bks. which is analyzed with descriptive techniques using related laws and regulations.

The results of the study concluded that the Panel of Judges who decided the divorce case of Civil Servants without a permit from the authorized official was in accordance with the formal and material laws which became the basis for proceedings at the Religious Court because it was based on Article 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Article 19 letter (f) Government Regulation Number 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, regarding the absence of a permit from an authorized official, is in accordance with item 5 SEMA number 5 of 1984 concerning Implementation of Government Regulation Number 10 of 1983 , and the legal consequences of the decision to divorce without the authorized official's permission for civil servants, according to Government Regulation Number 45 of 1990, Article 15 paragraph (1) is subject to severe punishment.

In line with the above conclusion, it is necessary to amend Article 3 paragraph 1 of Government Regulation Number 10 of 1983 jo. Government Regulation Number 45 of 1990, namely a Civil Servant who carries out a Divorce does not need to get permission from the official but only reports administratively and the need to remove sanctions from legal consequences caused by a Civil Servant filing for divorce without the official's permission because the sanction is not in accordance with the principle of justice upheld by law.

***Keywords: Divorce, Civil Servant***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Adapun judul Tesis ini adalah : “ **Analisis Yuridis Penetapan Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil** ” Didalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat, para pembimbing : Bapak Dr.Ir.Hanafi Darwis,S.H,S.Pd.,M.M., dan Bapak Dr.Gatot Efrianto, S.H.,M.H.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Tim Dosen Penguji dan semua pihak yang telah turut serta membantu menyumbangkan pikirannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-per satu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Bekasi, Januari 2021

Penulis,  
Pudjiantono Pinugroho

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Putusan Pengadilan Agama.....	8
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berfikir .....	10
1.5.1 Kerangka Teori .....	10
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	18
1.5.3 Kerangka Berfikir.....	20
1.6 Metode Penelitian .....	22
1.7 Jenis Penelitian .....	22
1.8 Pendekatan Penelitian .....	22
1.9 Jenis dan Sumber Data.....	23
1.10 Sistematika Penulis .....	23



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
2.1 Pengertian Perceraian .....	25
2.2 Peosedur dan Aturan Perceraian di Pengadilan Agama.....	33
2.2.1 Prosedur Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Agama.....	35
2.2.2 Aluar Proses Persidangan di Pengadilan Agama.....	39
2.3 Perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.....	41
2.3.1 Alasan-alasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	43
2.3.2 Prosedur dan Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	44
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	 <b>49</b>
3.1 Putusan Pengadilan Agama Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa adanya Izin dari Pejabat yang berwenang .....	49
3.2 Identitas Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon ( Tabel 1).....	50
3.3 Deskripsi Duduk Perkara (Tabel 2).....	53
3.4 Bukti dan Saksi (Tabel 3).....	63
3.5 Pertimbangan Hukum (Tabel 4).....	66
3.6 Keputusan Hakim (Tabel 5 ).....	87
 <b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>90</b>
4.1 Analisis Yuridis Penetapan Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izi Pejabat Yang Berwenang .....	90
4.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim memutus Putusan Cerai Tanpa Surat Izin Pejabat Yang Berwenang.....	92
4.1.2 Dasar Hukum Majelis Hakim Memutus Putusan Cerai Tanpa Surat Izin Pejabat Yang Berwenang.....	96
4.2 Akibat Hukum Putusan Cerai Tanpa Izin Pejabat Yang berwenang Terhadap Pegawai Negeri Sipil .....	101

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

